Nama : Nurul rifdah herman

Nim : 10100119068

Jurusan : Hukum keluarga islam (B)

“TUGAS PENGANTI UTS H.A. TATA USAHA NEGARA”

1. Menurut saudara, apakah langkah tim kuasa hukum Andi Suhaimi dalam menunda hasil pemilihan umum/pemilihan kepala daerah ke PTUN? Jelaskan disertai Referensi.

Menurut saya, tindakan atau langkah yang diambil oleh tim kuasa hukum Andi Suhaimi dalam menunda hasil pemilihan umum/kepala daerah ke PTUN, Kenapa? Karena sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang membagi jenis sengketa Pilkada menjadi dua yaitu :

- sengketa administrasi yang menjadi kewenangan peraturan
- sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,

Namun di lain sisi dengan adanya undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dalam pasal 57c bahwa dalam hal terjadi sengketa di dalam Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, di surat edaran itu juga mengatakan bahwa mengenai sengketa hasil pemilihan bukan wewenang tata usaha Negara.

Kesimpulan: jadi yang saya pahami jika ingin menggugat hasil pemilihan umum/pemilihan kepala daerah itu ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e, menyebutkan bahwa kewenangan MK termasuk untuk memutus sengketa hasil Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. walaupun ini termasuk ke dalam wewenang PTTUN karena hal tersebut masuk ke dalam keputusan PTUD yang bersifat administratif namun karena belum ada UU yang mengatur maka MK lah yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.

REFERENSI:

1. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1336946&val=908&title=KEWENANGAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20PADA%20SENGKET A%20HASIL%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH#page=4&zoom=auto,-99,685>.

2. <http://repository.lppm.unila.ac.id/5868/1/797-2494-1-PB.pdf>.

2. Jika gugatan di ajukan, Apa yang menjadi objek sengketanya? J elaskan.

Sesuai dengan artikel yang di bagikan objek sengkenya adalah pengeluaran keputusan hasil pemilihan suara ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah oleh komisi pemilihan umum (KPU) labuhanbatu tanpa menunggu keputusan yang seharusnya di keluarkan oleh mahkamah konstitusi karena di duga hasil PSU penuh dengan kecurangan dan mengabaikan ketentuan Pasal 54 ayat (7) yang bermakna apabila terjadi sengketa maka komisi pemilihan umum harus menunggu putusan mahkamah konstitusi sebelum menetapkan paslon pemenang dan dimana sengketa ini telah di daftarkan di mahkamah konstitusi.

Sehingga komisi pemilihan umum(KPU) dikatakan terlalu terburu-buru dalam melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih dan mengeluarkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) sehingga keputusan / kebijakan bisa di katakan keliru karena tidak memerhatikan / mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga terciptanya ketidakpastian hukum dan tindakan ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) .

Sehingga inilah yang menjadi alasan dan objek dari kasus persengketaan yang di alami oleh tim kuasa hukum andi suhaimi dalimunthe-faizal amri siregar dalam pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah dan komisi pemilihan umum (KPU) labuhanbatu.